

BP KP D

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SOPPENG

EVALUASI INTERNAL

TRIWULAN I

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah. Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2022 Pemerintah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dapat disusun.

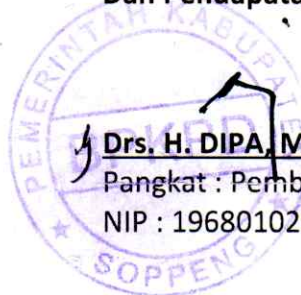
Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2022, telah menjalankan kewenangan kegiatannya sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai. Bahan Laporan ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan serta sebagai bahan masukan untuk perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Terimakasih kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang berharga bagi pihak yang berkepentingan..

Watansoppeng, 11 April 2022

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng



Drs. H. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680102 199603 1 005

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Program dan Kegiatan.....	1
B. Faktor-Faktor yang terkait Kinerja.....	15
Bab II. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	17
Bab III. Penutup	33
A. Kesimpulan.....	33
B. Saran.....	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Program dan Kegiatan

Adapun dalam pelaksanaannya secara umum kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sudah sesuai target kinerja yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA 2022), baik dilihat dari sisi pengelolaan keuangan bidang pendapatan maupun belanjanya. Berdasarkan Dokumen Pengesahan Perubahan Anggaran (DPPA Tahun 2022) maka Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng sebagaimana dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan dengan 7 (tujuh) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.22.413.867.541,- dapat terealisasi sebesar Rp.2.782.209.207,- atau 12.41%. Adapun penyerapan anggaran (berdasarkan Rencana Anggaran Kas) untuk triwulan I mencapai 49.97% dari target RAK sebesar Rp.5.567.792.486,-.

Rendahnya pencapaian target penyerapan anggaran pada Triwulan I disebabkan beberapa sub kegiatan tertunda pelaksanaannya karena mengalami pergeseran anggaran mendahului perubahan. Implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Daerah yang sesuai regulasi. Jumlah Anggaran Rp.50.130.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.200.000,- atau 2.39%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.11.750.000, terealisasi sebesar 10.21% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.7.795.000,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.2.750.000,- Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 3 dokumen (Ranwal Renja Tahun 2023, Rencana Aksi Pokok Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022)

- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen RKA yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.14.705.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.600.000,- atau 4.08%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.2.800.000, terealisasi sebesar 21.43% Adapun realisasi fisik triwulan I sebanyak 1 dokumen (Dokumen DPA-SKPD)
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.15.830.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.600.000,- atau 3.79%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.2.300.000, terealisasi sebesar 26.09%. Adapun realisasi fisik triwulan I sebanyak 1 dokumen (Dokumen DPA Pergeseran Mendahului Perubahan)
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD, Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.11.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.3.900.000, terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 8 dokumen (LKj, LPPD, Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2021, , Evaluasi Eencana Aksi, Triwulan IV Tahun 2021, evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2021, evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2021,)



- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah hasil yang dicapai adalah Persentase keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan. Jumlah Anggaran Rp.13.485.914.206,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.380.994.920,- atau 10.24%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.3.139.816.997,-, terealisasi sebesar 44.00% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Hasil yang dicapai adalah terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN. Jumlah Anggaran Rp.13.322.651.206,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.375.194.920,- atau 10.32%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.3.103.831.997,-, terealisasi sebesar 44.33%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I adalah terbayarnya gaji dan tunjangan 99 ASN.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, hasil yang dicapai adalah jumlah SPM yang diverifikasi. Jumlah Anggaran Rp.118.340.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.800.000,- atau 4.90%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.29.585.000,-, terealisasi sebesar 19.60%. Realisasi fisik triwulan I sebanyak 80 SPM.
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan (Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.44.923.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.6.400.000,-, terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 1 dokumen. (Laporan Keuangan SKPD)



- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase peningkatan kedisiplinan sumber daya aparatur. Jumlah Anggaran Rp.41.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.350.000,- atau 5.72%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.10.300.000,- terealisasi sebesar 22.82% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, hasil yang dicapai adalah Tersesainya dokumen kepegawaian. Jumlah Anggaran Rp.41.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.350.000,- atau 5.72%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.10.300.000,- terealisasi sebesar 22.82%. Realisasi fisik triwulan I sebanyak 4 dokumen (SKP, Dokumen Absensi ASN, Dokumen Berkala ASN, Dokumen Kenaikan Pangkat ASN, Dokumen KP4, Dokumen Pensiun ASN, Dokumen cuti, izin, sakit ASN).



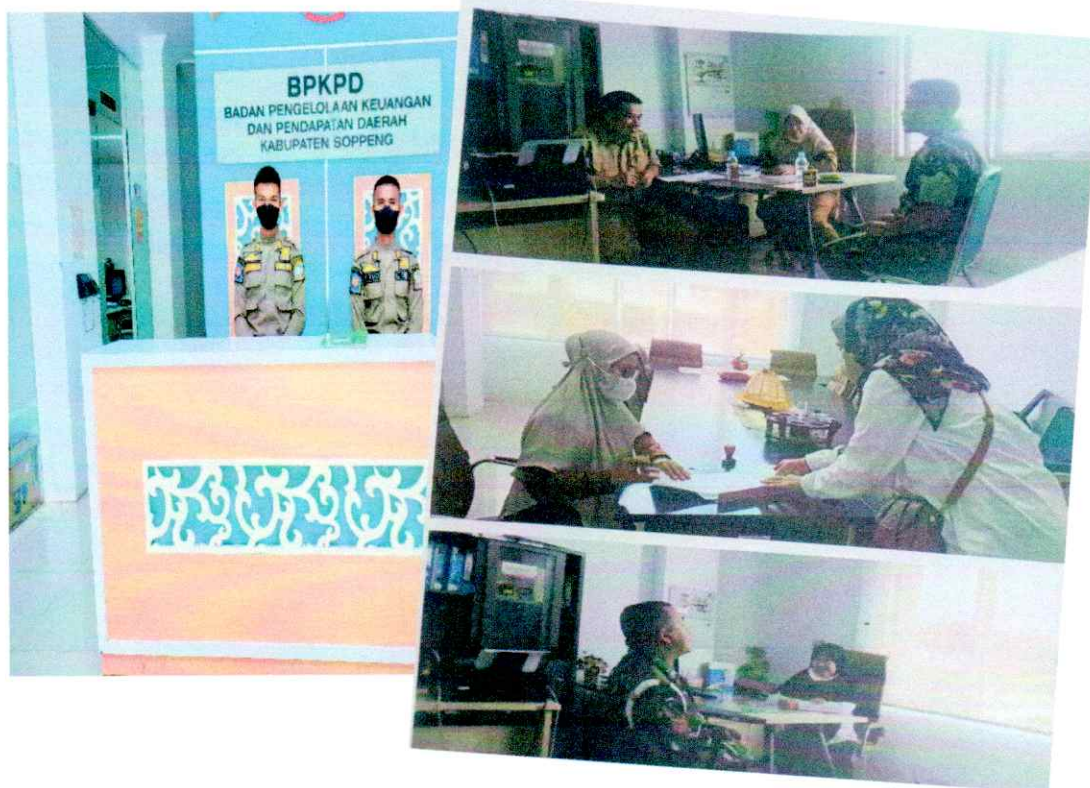
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran. Jumlah Anggaran Rp.1.169.914.320,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.85.704.100,- atau 7.33%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas

Triwulan I Rp.244.885.000,- terealisasi sebesar 35.00% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, hasil yang dicapai adalah tersedainya jenis alat listrik/penerangan bangunan. Jumlah Anggaran Rp.27.933.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.8.400.000,- terealisasi sebesar 0%. Realisasi fisik triwulan I sebanyak 2 jenis. (Alat listrik dan Jasa instalasi listrik)
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, hasil yang dicapai adalah Jumlah paket bahan logistik kantor. Jumlah Anggaran Rp.143.565.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.17.450.000,- atau 12.15%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.40.785.000,- terealisasi sebesar 42.79%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 3 paket (Tabung Gas, Makan minum rapat dan Makan minum aktivitas lapangan)
- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, hasil yang dicapai adalah Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Jumlah Anggaran Rp.324.652.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.78.067.500,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 3 jenis (Cetak, bahan persediaan benda berharga dan penggandaan)
- d. Penyediaan Bahan/Material, hasil yang dicapai adalah Jumlah jenis bahan/material yang disediakan. Jumlah Anggaran Rp.248.764.970,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.39.591.400,- atau 15.92%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.42.132.500,- terealisasi sebesar 93.97%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 3 paket, (ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer)
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu, hasil yang dicapai adalah Jumlah tamu yang difasilitasi. Jumlah Anggaran Rp.20.425.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.750.000,- atau 8.57%. Terhadap Target

Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.5.500.000,- terealisasi sebesar 31.82%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 200 orang.

- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya. Jumlah Anggaran Rp.404.573.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.26.912.700,- atau 6.65%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.70.000.000,- terealisasi sebesar 38.45%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 287 kali, baik perjalanan dinas dalam maupun luar daerah.



- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase keterpenuhan peralatan dan mesin kantor. Jumlah anggaran sebesar Rp.397.530.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Laptop, PC dan Server). Jumlah anggaran sebesar Rp.337.530.000,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp.0,- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.337.530.000,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I Laptop 12 unit.

- b. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah sarana dan prasarana pendukung berupa sumur bor. Jumlah anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.20.000.000,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I belum terlaksana.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran. Jumlah Anggaran Rp.7.071.109.965,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.303.697.656,- atau 18.44%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.1.767.512.989,- terealisasi sebesar 73.76%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, hasil yang dicapai adalah Jumlah paket pengiriman Jumlah Anggaran Rp.10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.2.500.000,- terealisasi sebesar 0%. Realisasi fisik triwulan I sebanyak 0 kali.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, hasil yang dicapai adalah Jumlah pembayaran jasa telepon, air dan listrik. Jumlah Anggaran Rp.6.541.309.965,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.153.046.056,- atau 17.63%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.1.635.063.489,- terealisasi sebesar 70.52%. Realisasi fisik triwulan I sebanyak 9 kali (biaya listrik 3 kali, biaya air 3 kali, biaya internet 3 kali).
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, hasil yang dicapai adalah Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan. Jumlah Anggaran Rp.519.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.150.651.600,- atau 28.98%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I

Rp.129.949.500,- terealisasi sebesar 115.93%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 2 jenis. (Jasa Tenaga kebersihan dan Jasa Tenaga Sopir) Jasa tenaga kebersihan mencakup biaya jasa rekanan/Pihak ketiga untuk mengelola kebersihan Kantor BPKPD, Pusat Pertokoan dan Gedung Pertemuan Masyarakat).

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Jumlah Anggaran Rp.198.219.050,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.262.531,- atau 4.17%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.53.997.500,- terealisasi sebesar 15.30%. dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, hasil yang dicapai adalah Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK. Jumlah Anggaran Rp.157.444.050,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.262.531,- atau 5.25%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.39.235.000,- terealisasi sebesar 21.06%. Realisasi fisik triwulan I adalah terlaksananya pemeliharaan terhadap 128 unit randis roda dua dan 3 unit randis roda empat.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Jumlah Anggaran Rp.19.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.4.762.500,- terealisasi sebesar 0%.. Realisasi fisik triwulan I adalah pemeliharaan AC sebanyak 5 unit
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah unit gedung yang direhab & luas gedung kantor yang dipelihara. Jumlah Anggaran Rp.21.725.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.10.000.000,- terealisasi sebesar

0%. Realisasi fisik triwulan I berupa pemeliharaan Gedung pertemuan (pengecetan dan rehab Gedung pertemuan)

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

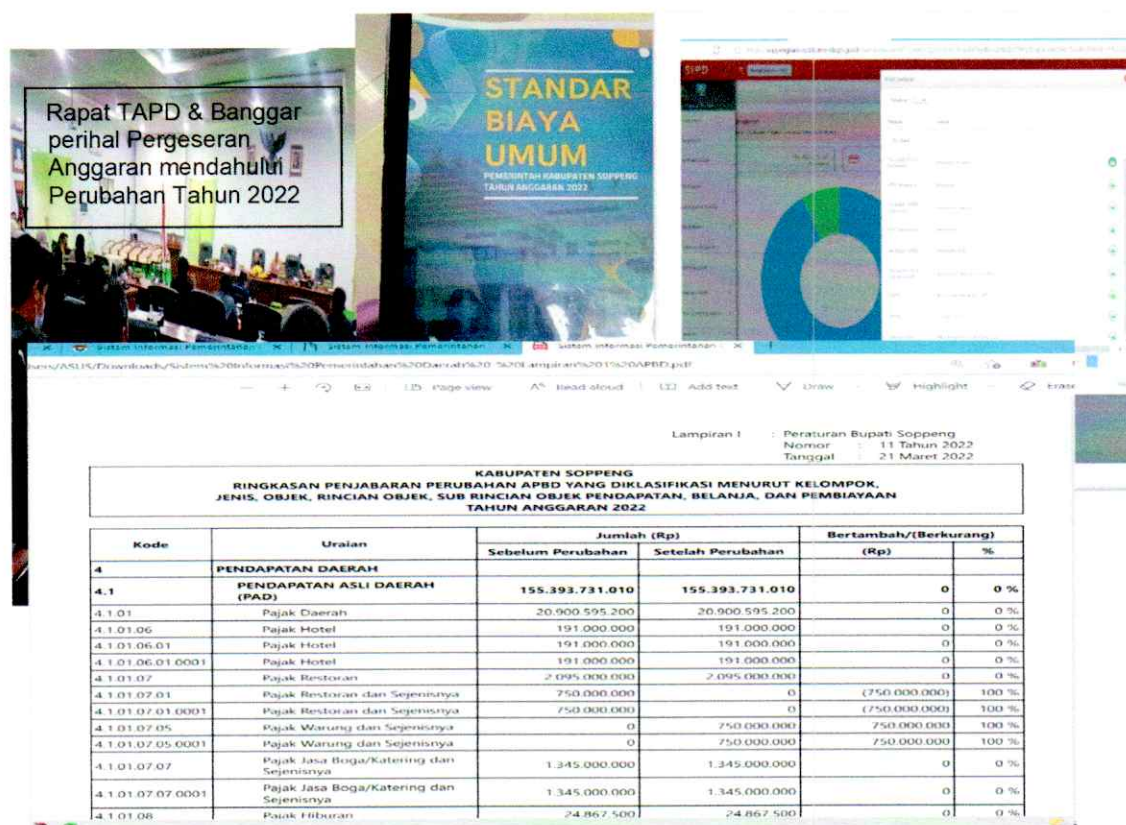
Terlaksananya program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 4 (empat) kegiatan dan Jumlah Anggaran Rp.120.988.355.329,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.320.513.244- atau 0.26%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.38.413.212.777,- terealisasi sebesar 0.83%. dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, hasil yang dicapai adalah Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah tepat waktu. Jumlah Anggaran Rp.1.177.605.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.300.000- atau 1.89%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.206.750.000,- terealisasi sebesar 10.79%. dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok. Jumlah Anggaran Rp.24.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.10.050.000,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I belum dilaksanakan karena tahapan penyusunan KUA PPAS akan dilaksanakan pada Triwulan III
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan. Jumlah Anggaran Rp.38.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.5.400.000,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I belum dilaksanakan karena tahapan penyusunan Perubahan KUA PPAS akan dilaksanakan pada Triwulan II
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD yang di Asistensi. Jumlah Anggaran Rp.36.225.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0- atau 0%.

Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.3.000.000,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I belum dilaksanakan karena tahapan tahap penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD akan dilaksanakan pada Triwulan III

- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD yang di Asistensi. Jumlah Anggaran Rp.43.225.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.2.925.000,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I belum dilaksanakan karena tahapan tahap penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD akan dilaksanakan pada Triwulan III
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD yang di Asistensi. Jumlah Anggaran Rp.5.775.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.900.000- atau 84.85%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.5.775.000,- terealisasi sebesar 84.85%. Realisasi fisik triwulan I sebanyak 34 dokumen DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD yang di Asistensi. Jumlah Anggaran Rp.5.950.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.5.950.000,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I belum dilaksanakan karena tahapan tahap penyusunan dan verifikasi Perubahan DPPA-SKPD akan dilaksanakan pada Triwulan III
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan perbup tentang APBD. Jumlah Anggaran Rp.524.525.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.250.000- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.30.800.000,- terealisasi sebesar 36.53%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I adalah penggandaan dokumen APBD dan Perbup APBD Tahun 2022.

- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen Perubahan Rancangan Peraturan Daerah dan Perubahan Perbup tentang APBD. Jumlah Anggaran Rp.480.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.150.000- atau 1.28%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.136.550.000,- terealisasi sebesar 4.50%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 2 dokumen yakni dokumen Perbup Pergeseran APBD Mendahului Perubahan I dan II Tahun 2022.
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, hasil yang dicapai adalah Jumlah standar biaya umum. Jumlah Anggaran Rp.18.905.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0 - atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.12.250.000,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 1 dokumen Standar Biaya Umum.



- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, hasil yang dicapai adalah Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah. Jumlah Anggaran Rp.128.654.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.26.200.000- atau 20.36%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.32.206.500,- terealisasi sebesar 81.35%. dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen kas daerah. Jumlah Anggaran Rp.16.783.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.550.000- atau 3,28%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.3.935.000,- terealisasi sebesar 13.98%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 1 dokumen (BKU, Register Penutupan Kas, Daftar Penyetoran ke Kas Daerah, Daftar Laporan Pengeluaran Daerah sesuai SP2D)
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD. Jumlah Anggaran Rp.15.010.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.025.000- atau 40.14%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp. 6.025.000,- terealisasi sebesar 100%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 1 dokumen (Palaporan RAK dan Dokumen SPD Triwulan I).
 - c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD pengelola Dana DAK. Jumlah Anggaran Rp.16.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.875.000- atau 17.91%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.3.480.000,- terealisasi sebesar 82.61%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 9 SKPD pengelola dana DAK (terlaksananya kegiatan forum group discussion (FGD) penyaluran tahap I)
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak

Kertiga (PFK), hasil yang dicapai adalah Jumlah laporan. Jumlah Anggaran Rp.23.290.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.400.000- atau 23.19%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.5.595.000,- terealisasi sebesar 96.51%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 6 dokumen (IWP 1%, IWP 8%, Rekening koran penerimaan dan pengeluaran, Sp2D, Register Sp2D, NTPN)

- e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, hasil yang dicapai adalah Jumlah berita acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi. Jumlah Anggaran Rp.25.355.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.925.000- atau 27.31%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp. 6.925.000,- terealisasi sebesar 100%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 6 berita acara. (BE Rekonsiliasi Penerimaan, BA Rekonsiliasi DAK Fisik & Non Fisik), BA Rekonsiliasi Bank, BA Rekonsiliasi Register SP2D, BA Rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat, BA Rekonsiliasi DID)
- f. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota, hasil yang dicapai adalah Persentase penyelesaian verifikasi SP2D tepat Waktu. Jumlah Anggaran Rp.32.166.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.425.000- atau 13.76%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.8.686.500,- terealisasi sebesar 50.94%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebesar 100%. Terlaksananya kegiatan verifikasi SPM di 34 SKPD dengan tepat waktu.



- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, hasil yang dicapai adalah Terlaksananya akuntansi dan tersusunnya pelaporan keuangan daerah yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.356.130.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.395.000- atau 2.92%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.76.630.250,- terealisasi sebesar 13.57%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, hasil yang dicapai adalah jumlah laporan keuangan yang akuntabel. Jumlah Anggaran Rp.34.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.045.000- atau 8.76%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.8.686.500,- terealisasi sebesar 35.05%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 2 laporan (Laporan Realisasi Penerimaan dan Laporan Realisasi Pengeluaran)
 - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban, Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis kabupaten. Jumlah Anggaran Rp.45.960.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.500.000- atau 9.79%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.11.490.000,- terealisasi sebesar 39.16%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 34 Laporan Keuangan SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi.
 - c. Koordinasi Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran, hasil yang dicapai adalah jumlah laporan keuangan pemerintah daerah. Jumlah Anggaran Rp.30.765.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.850.000- atau 9.26%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.7.691.250,- terealisasi sebesar 37.06%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Un Audited dan 102 Laporan Realisasi Bulanan SKPD (Januari, Pebruari, Maret) Tahun 2022 yang Terverifikasi sesuai Regulasi.

- d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah laporan keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT. Jumlah Anggaran Rp.85.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.30.437.500,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 1 dokumen (Laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 un audited).
- e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, hasil yang dicapai adalah Jumlah rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD & jumlah rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Jumlah Anggaran Rp.64.450.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.18.325.000,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I belum tersusunnya Rancangan Perda dan Perpub pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021.
- f. Koordinasi, sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah pelaksanaan sidang majelis. Jumlah Anggaran Rp.55.070.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.0,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I adalah belum terlaksananya Sidang Tuntutan Kerugian Dearah pada Triwulan I Tahun 2022.
- g. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, hasil yang dicapai adalah tersedianya Sisdur Akuntansi yang sesuai regulasi. Jumlah Anggaran Rp.39.245.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.0,- terealisasi

sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I belum dilaksanakan karena berdasarkan Anggaran Kas dan perencanaan sebelumnya bahwa penyusunan Sisdur Akuntansi baru akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2022



- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase keterpenuhan kegiatan penunjang urusan. Jumlah Anggaran Rp.119.325.965.829,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.261.618.244- atau 0,22%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.38.413.212.777,- terealisasi sebesar 0,68%. dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah paket alokasi dana penyaluran bantuan keuangan. Jumlah Anggaran Rp.1.675.770.914,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.261.618.244,- atau 15.61%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp. 261.618.244,- terealisasi sebesar 100%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I terbayarnya biaya provisi sebesar 15%.
- b. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah paket alokasi dana penyaluran bantuan keuangan. Jumlah Anggaran Rp.8.753.605.027,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.8.753.605.027- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebesar 00.00%.
- c. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, hasil yang dicapai adalah Jumlah paket alokasi dana penyaluran bantuan keuangan. Jumlah Anggaran Rp.103.056.818.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.25.764.204.679,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I adalah terlaksananya penyaluran bantuan keuangan berupa Alokasi Dana Desa kepada 49 Desa (25%).
- d. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, hasil yang dicapai adalah jumlah paket alokasi dana darurat dan mendesak. Jumlah Anggaran Rp.3.243.778.790,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp. 3.243.778.790,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebesar 0%.
- e. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota, hasil yang dicapai adalah jumlah paket alokasi dana bagi hasil Kabupaten/Kota . Jumlah Anggaran Rp.2.595.992.398,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%.



Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.648.998.098,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I belum terlaksananya pengelolaan dana Bagi Hasil Kabupaten Kota karena belum adanya permohonan atau pengajuan pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribuai.

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Terlaksananya program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 (satu) kegiatan Jumlah Anggaran Rp.1.207.450.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.91.787.040,- atau 7.60%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.289.210.000,- terealisasi sebesar 31.74%. dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Tersedianya dokumen pencatatan asset yang tepat dan benar. Jumlah Anggaran Rp.1.207.450.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.91.787.040,- atau 7.60%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.289.210.000,- terealisasi sebesar 31.74%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Standar Harga, hasil yang dicapai adalah Jumlah buku standarisasi harga satuan barang dan jasa. Jumlah Anggaran Rp.107.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.103.500.000,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I belum disusunnya dokumen SBU untuk tahun 2023.

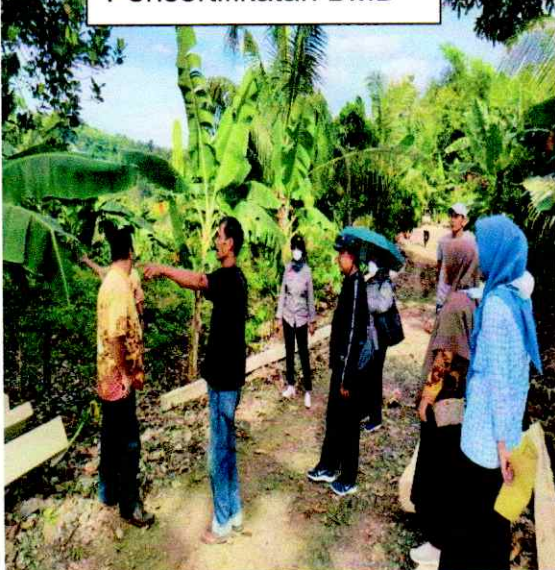
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah terlaksananya proses penatausahaan Barang Milik Daerah oleh SKPD dengan tertib dan benar. Jumlah Anggaran Rp.36.425.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.7.000.000,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I adalah terlaksananya rekonsiliasi dengan SKPD terkait pelaksanaan penatausahaan Barang Milik daerah Tahun 2022.
- c. Pengamanan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah Jumlah titik penjagaan. Jumlah anggaran Rp.853.265.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.82.487.040,- atau 9.67% Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.114.870.000,- terealisasi sebesar 71,81%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I, terdapat sekitar 49 bidang tanah yang sudah diukur dan terbit sebanyak 28 sertipikat. 10 diantaranya ada sertipikat pengganti, 3 adalah sertipikat yang terbit dari kegiatan PTSL dan sisanya adalah penerbitan sertipikat regular, tanah dibawah jalan sudah didaftar akan tetapi masih menunggu jadwal dari pertanahan untuk pengukuran. Khusus tanah dibawah jalan terkendala beberapa permohonan dalam satui ruas jalan karena terdapat beberapa desa/ kelurahan dan atau batas alam yang dilewati ruas tersebut sehingga akan terbit beberapa sertipikat dalam satu ruas tanah dibawah jalan, terkait tanah yang belum memiliki nilai perolehan dan hanya biaya sertipikat, menurut BPK bahwa tanah tersebut akan dilakukan appraisal
- d. Penilaian Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen penilaian asset daerah. Jumlah anggaran Rp.36.140.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0% Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.36.140.000,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I belum terlaksananya penilaian Barang Milik Daerah pada tahun 2022.
- e. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, hasil yang

dicapai adalah Jumlah dokumen pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, Pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah. Jumlah anggaran Rp.70.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.6.000.000,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 1 dokumen pemindahtanganan barang milik daerah dan 4 dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

- f. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen barang milik daerah. Jumlah anggaran Rp.104.520.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.300.000,- atau 8.90% Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.21.700.000,- terealisasi sebesar 42,86%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I sebanyak 5 dokumen untuk laporan BMD Triwulan I Tahun 2022.



Pensertifikatan BMD



Rekonsiliasi BMD



4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Terlaksananya program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 1 (satu) kegiatan dan Jumlah anggaran Rp.1.141.027.743,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.113.775.000,- atau 9.97% Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.535.517.848,- terealisasi sebesar 21.25%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, hasil yang dicapai adalah Tercapainya target pajak dan retribusi daerah. Jumlah anggaran Rp.1.141.027.743,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.113.775.000,- atau 9.97% Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.535.517.848,- terealisasi sebesar 21.25% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah peraturan perundang-undangan. Jumlah anggaran Rp.309.102.743,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.875.000,- atau 0.28% Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.198.097.848,- terealisasi sebesar 0,44%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I adalah pengelolaan pajak daerah pada 8 kecamatan dan 20 potensi pajak daerah.
 - b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah pendampingan wajib pajak dan retribusi. Jumlah anggaran Rp.69.875.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.200.000,- atau 7.44% Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.16.400.00,- terealisasi sebesar 31,71% Sedangkan realisasi fisik triwulan I adalah terlaksananya pendampingan wajib pajak dan retribusi bersama Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah yang terdiri dari anggota kejaksaan Negeri Watansoppeng
 - c. Penyuluhan dan penyeberluasan Kebijakan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah terlaksananya penyuluhan pajak daerah kepada 25 orang laki-laki dan 25 orang perempuan wajib pajak daerah tentang pengenaan pajak daerah 10% setiap pungutan pajak daerah. Jumlah

peraturan perundang-undangan. Jumlah anggaran Rp.23.670.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0% Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.23.670.000,- terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I adalah terlaksananya penyuluhan pajak daerah 10% kepada masyarakat wajib pajak baik laki-laki maupun perempuan.

- d. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi. Jumlah anggaran sebesar Rp.319.450.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.99.000.000,- atau 30.99%. Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.269.050.000,- terealisasi sebesar 36.80%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I belum dilaksanakannya pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi.
- e. Penagihan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah persentase jumlah SPPT yang terdistribusi. Jumlah anggaran Rp.358.480.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.650.000,- atau 2.13% Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.23.400.000,- terealisasi sebesar 32,69%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I adalah tercetaknya lembar SPPT pajak Daerah.
- f. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pungutan pajak dan retribusi daerah. Jumlah anggaran Rp.55.550.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0% Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I Rp.0 terealisasi sebesar 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan I adalah terbentuknya Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah yang terdiri atas Tim Kejaksaaan Negeri Watansoppeng.
- g. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase capaian target retribusi daerah. Jumlah anggaran Rp.4.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.050.000,- atau 21.43% Terhadap Target Rencana Anggaran Kas Triwulan I

Rp.4.900.000,- terealisasi sebesar 21,43%, Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebesar 100%.



B. Faktor-Faktor yang terkait Kinerja

a) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja antara lain :

1. Adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI)
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
3. Semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah
4. Komitmen dan semangat aparatur pengelola anggaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan
5. Ketersediaan fasilitas baik peralatan maupun sistem yang terintegrasi antara e-Planning, e-Budgeting dan e-Monev
6. Tidak dipungut biaya pelayanan
7. Kesopanan, keramahan, Kecepatan dan Ketepatan jadwal pelayanan
8. Melakukan jemput bola, petugas turun di setiap kecamatan
9. Kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas
10. Pencapaian yang baik atas sasaran Kinerja berdasarkan Tupoksi
11. Adanya target kinerja yang terukur dan logis.
12. Pelaksanaan kegiatan lebih awal, agar di akhir tahun data dapat tersaji lebih cepat.

b) Faktor penghambat Keberhasilan Kinerja

1. Cepatnya perubahan beberapa peraturan yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah
2. Sering terlambatnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang besarannya tidak bersifat final.
3. Sering terjadinya perbedaan persepsi tentang implementasi ketentuan peraturan dengan aparaturnya pemeriksa
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi
5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan administrasi,
6. Penempatan pegawai tidak sesuai dengan latar belakang dan kualifikasi pendidikannya
7. Kurangnya keahlian pegawai,
8. Rendahnya kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah Daerah
9. Belum optimalnya manajemen pelaksanaan program/kegiatan strategis sehingga pencapaiannya cenderung belum efektif dan akuntabel

BAB II

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Evaluasi Internal dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

SASARAN I

MENINGKATNYA TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

Bila dibandingkan dengan realisasi dengan target, maka sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah** pada Triwulan I Tahun 2022 belum mencapai target tahunan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Perbandingan target dan realisasi sasaran I pada Triwulan I Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	Indeks (I)	8.52	0	0
		Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	Indeks (I)	20	0	0
		Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	Indeks (I)	13.92	0	0
		Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	Indeks (I)	15	0	0
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5)	Indeks (I)	3.69	0	0
		Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	Indeks (I)	15	0	0
		Rata-rata Capaian				0

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui

suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

Beberapa hal yang menyebabkan tercapai dan belum tercapainya target indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah** pada tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)

Indeks ini merupakan alat untuk mengukur sejauhmana konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran baim dari segi kesesuaian jumlah Pagu Program dan Nomenklatur Program antara dokumen RPJMD, RKPD, PPAS dan APBD.

Pengukuran Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

APBD Tahun 2022

URAIAN/INDIKATOR	TOTAL PROGRAM	JUMLAH PROGRAM YANG SESUAI	SKOR RATA-RATA	RATA-RATA x BOBOT/5)
Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS	180	180	1	3.00
Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD	180	180	1	3.00
Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS	180	162	0.90	2.70
Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD	180	137	0.73	2.18
JUMLAH			3.63	10.88
SKOR RATA-RATA			0.91	
INDEKS D1 SKOR RATA-RATA DIKALI BOBOT (BOBOT 12)				10.88

Target untuk indeks ini adalah sebesar 8.55 dan realisasi sebesar 10.88, Capaian menunjukan angka 127.25%.

Data yang digunakan dalam mengukur indeks ini pada triwulan I Tahun 2022 adalah berdasarkan Lampiran 9 Perda APBD Tahun 2022 (sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Parturan Daerah tentang APBD).

Walaupun target pada Dimensi 1 ini tercapai, namun terdapat beberapa hal yang mempengaruhi dalam hal pencapaian target kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022, antara lain :

- Komitmen dari pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan.
- Penggunaan aplikasi yang terintegrasi sesuai tahapan mulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan APBD.
- Kebijakan dari pemerintah pusat.
- Penyesuaian dengan kebijakan atau peraturan yang diterbitkan setelah dokumen perencanaan sebelumnya telah ditetapkan.
- Adanya perubahan kondisi daerah yang mengharuskan adanya penyesuaian Dokumen Penganggaran yang kurang sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Keterlambatan informasi tentang pagu defenitif transfer kedaerah tidak jarang diperoleh pemerintah daerah setelah proses perencanaan selesai dilaksanakan. Selain itu khusus DAK, menu setiap tahunnya berbeda-beda.

b. Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)

Indeks pengalokasian anggaran merupakan sejauh mana perhatian dan ketaatan pemerintah daerah untuk memenuhi beberapa amanat peraturan perundang-undangan (mandatory spending).

Target untuk indeks ini adalah sebesar 20 dan realisasi sebesar 20. Capaian menunjukan angka 100%.

Tercapainya target pengalokasian anggaran belanja pada tahun 2022 adalah disebabkan beberapa hal :

- Besarnya perhatian pemerintah daerah untuk memenuhi mandatory spending adalah juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
- Ketaatan pemerintah pada Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Pada tahun 2021 alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp. 409.110.770.323 atau 31.34% dari Total APBD.
- Ketaatan pemerintah daerah terhadap besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Pada Tahun 2021 alokasi Anggaran kesehatan sebesar

Rp.323.275.739.004 atau 34.74% dari Total APBD (diluar gaji Non ASN)

- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN). Pada tahun 2021 belanja infrastruktur sebesar Rp.422.867.204.643 atau 78.70% dari Total transfer ke daerah.
- Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Pada tahun 2021 Alokasi ADD sebesar 13.06% dari dana Perimbangan.

c. Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)

Indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah daerah dalam hal memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi juga merupakan salah satu elemen kunci didalam good governance berupa penjaminan akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan publik. Nilai transparansi masih menggunakan nilai Tahun 2021

Pengukuran Dimensi Transparansi Triwulan I Tahun 2022

No	Komponen	Ketepatan waktu						Total Skor
		Tanggal Penetapan	Tanggal Unggah	Rentang Waktu (hari)	Sesuai/ Tidak sesuai	Nilai	Keter aksesan	
1	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD			1	Sesuai	1	1	1
2	Informasi Kebijakan Umum Anggaran			1	Sesuai	1	1	1

No	Komponen	Ketepatan waktu						Total Skor
		Tanggal Penetapan	Tanggal Unggah	Rentang Waktu (hari)	Sesuai/ Tidak sesuai	Nilai	Keter aksesan	
3	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafond Anggaran			1	Sesuai	1	1	1
4	Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD			1	Sesuai	1	1	1
5	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD			1	Sesuai	1	1	1
6	Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD			1	Sesuai	1	1	1
7	Informasi Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD			1	Sesuai	1	1	1
8	Informasi Ringkasan DPA SKPD				Sesuai	1	1	1
9	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah				Sesuai	1	1	1
10	Informasi Realisasi Belanja Daerah				Sesuai	1	1	1
11	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah				Sesuai	1	1	1
12	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD				Sesuai	1	1	1
13	Informasi Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD				Sesuai	1	1	1
14	Informasi Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD				Sesuai	1	1	1
15	Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD				Sesuai	1	1	1
16	Informasi Rencana Umum Pengadaan				Sesuai	1	1	1
17	Informasi SK Kepala Daerah Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah				Sesuai	1	1	1
18	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi				Sesuai	0	1	0.5
19	Informasi Laporan Arus Kas				Sesuai	1	1	1
20	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD				Sesuai	1	1	1
21	Informasi Neraca				Sesuai	1	1	1
22	Informasi CaLK Pemerintah Daerah				Sesuai	1	1	1
23	Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah				Sesuai	1	1	1

No	Komponen	Ketepatan waktu						Total Skor
		Tanggal Penetapan	Tanggal Unggah	Rentang Waktu (hari)	Sesuai/ Tidak sesuai	Nilai	Keter aksesan	
24	Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah				Sesuai	1	1	1
25	Infomasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				Sesuai	1	1	1
26	Informasi Opini BPK				Sesuai	1	1	1
Jumlah Skor						2	26	25.5
Rata-Rata						0.96	1	0.9808
Bila kolom Nilai Terisi 1 dan Keteraksesan Terisi 0, maka jumlah skor adalah 0,05								

Catatan

Ketepatan waktu penyajian diberikan nilai 1 jika informasi/dokumen keuangan daerah disajikan dalam situs jaringan resmi Pemda atau SIPD dalam waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan

Keteraksesan. Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen keuangan daerah yang diukur tersedia untuk diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan resmi Pemda atau SIPD dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya

INDIKAtOR	SKOR		SKOR RATA-RATA
Ketepatan waktu	25/26	0.96	$(0.96+1)/2$ $= 0.9815$
Keteraksesan	26/26	1	
INDEKS D3 SKOR RATA-RATA x BOBOT (Nilai Tahun 2021)	0.9815 x 15		14.72

Target untuk indeks ini adalah sebesar 13.93 dan realisasi sebesar 14.72. Capaian menunjukan angka 105.82%.

Tercapainya target transparansi pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2022 adalah didukung beberapa hal :

- Adanya penggunaan aplikasi SIPD yang terintegrasi secara online antara dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang dapat diakses oleh pengguna dokumen.
- Konsistensi dan aksesibilitas penyajian laporan keuangan
- Komitmen Manajemen
- Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja
- Adanya sarana informasi publik online (via website) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

d. Penyerapan anggaran (Dimensi 4)

Indeks penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran merupakan salah satu bentuk tahapan dari siklus APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran, persetujuan Bersama, evaluasi anggaran, penetapan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya.

Pengukuran Dimensi Penyerapan Anggaran Triwulan I Tahun 2022

No	Indikator	Triwulan I Tahun 2022			
		Anggaran	Realisasi	Persentase Penyerapan Anggaran	Skor
1	Penyerapan anggaran belanja operasional	872,955,528,384	82.408.237.362	9.35	0
2	Penyerapan anggaran belanja modal	282,796,430,259	40.691.917.780	10.63	0
3	Penyerapan anggaran belanja tidak terduga	3,243,778,790	0	0	0
4	Penyerapan anggaran belanja transfer	105.652.811.098	0	0	0
JUMLAH					0

catatan

Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau diatas 80% (>80%) maka skor diberi angka 1. Sebaliknya persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% (<80%) maka skor diberikan angka 0

Skor Rata-Rata Indeks (D4) Tahun 2022	0/4	=	0
INDEKS D4 tahun 2022	0 x 20	=	0

Target untuk indeks ini adalah sebesar 15 dan realisasi sebesar 0 sehingga capaian menunjukan angka 0%.

Target penyerapan anggaran belum tercapai pada Triwulan I Tahun 2022 disebabkan beberapa hal :

- Masih dilakukannya pergeseran anggaran mendahului perubahan pada beberapa sub kegiatan
- Beberapa sub kegiatan telah dilaksanakan namun pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses.
- Pelaksana sub kegiatan belum sepenuhnya tertib dan disiplin dalam mengelola anggaran sesuai Rencana Anggran Kas
- Terget Penyerapan anggaran memang ditargetkan terpenuhi pada akhir Triwulan IV tahun 2022.
- Belum memasuki tahapan perubahan APBD Tahun 2022

e. Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5)

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, yang terdiri atas kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, sovabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka Panjang dan solvabilitas layanan).

Pengukuran Kondisi Keuangan Daerah

No	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021*	2022*	SKOR
1	Indeks Kondisi Keuangan Daerah	2.57	2.98	3.23	3.23	3.23	3.23
JUMLAH							3.23

Catatan

Indeks Rasio i_n = (Nilai actual pada penghitungan rasio – nilai minimal pada rasio tersebut) / (nilai maksimal – nilai minimal)

Indeks Rasio i_n diperoleh dari rata-rata indeks Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

Data Indeks keuangan Daerah untuk tahun 2022 belum dapat diukur secara manual, karena harus menyandingkan dengan rasio masing-masing kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Nilai IPKD untuk tahun

2022 belum dapat ditentukan karena belum dilakukan pengukuran oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Target untuk indeks ini adalah sebesar 3.68 dan realisasi sebesar 3.23 (realisasi tahun 2020) Capaian menunjukan angka 87.77%.

- f. Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)
- Pemberian Opini atas LKPD dilakukan oleh BPK sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan opini atas LKPD antara lain harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, system pengendalian internal dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran Dimensi Opini BPK

No	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021*	SKOR
1	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	1
JUMLAH						1

catatan

Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 3 tahun berturut-turut akan diberikan skor 1, dua tahun berturut-turut diberikan skor 2/3, dan satu tahun diberikan skor 1/3

Skor Rata-Rata Indeks (D6) Tahun 2022	3/3	=	1
INDEKS D6 tahun 2021	1 x 15	=	15

Target untuk indeks ini adalah sebesar 15 dan realisasi sebesar 15 Capaian menunjukan angka 100%.

Adapun realisasi untuk indeks ini pada saat penyusunan LKj Tahun 2021 belum dapat dipastikan. Hal ini disebabkan karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 oleh BPK masih dalam tahap pemeriksaan (Hasil Audit diprediksi pada Bulan Mei 2022). Realisasi diatas merupakan nilai sementara yang diperoleh dari realisasi tahun 2020.

Pencapaian opini WTP oleh BPK dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- Kelemahan system pengendalian akuntansi dan pelaporan
- Kelemahan system pelaksanaan angagran pendapatan dan belanja
- Kelemahan struktur pengendalian intern
- Kerugian daerah

- Potensi kerugian daerah
- Ketidakhematan
- Ketidakefektifan

⇔ Capaian Kinerja :

Indeks Keseuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, indeks Pengalokasian Anggaran, Indeks Transparansi, Indeks Penyerapan Anggaran, Indeks Kondisi Keuangan Daerah dan Indeks Opini BPK terdapa LKPD

⇔ Penyebab keberhasilan/ kegagalan

1. Komitmen dan semangat aparatur pengelola anggaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan
2. Adanya target Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
3. Ketersediaan fasilitas baik peralatan maupun sistem yang mulai terintegrasi melalui aplikasi SIPD

⇔ Kendala – kendala Yang di hadapi serta Solusi

1. Cepatnya perubahan beberapa peraturan yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah
2. Sering terlambatnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang besarannya tidak bersifat final.
3. Sering terjadinya perbedaan persepsi tentang implementasi ketentuan peraturan dengan aparatur pemeriksa
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi
5. Terlambatnya penyusunan Renstra SKPD
6. Seringnya terbit pemutakhiran terhadap peraturan yang baru saja mulai diterapkan

Solusi dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain :

1. Menentukan target kinerja yang terukur dan logis
2. Menyiapkan dan menyimpan kelengkapan dokumen dengan baik
3. Melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk e-SAKIP.
4. Mengakomodir kebutuhan SDM berlatar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi

- 5. Senantiasa menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan berikut pemutakhirannya.
- 6. Tetap mengoptimalkan konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran

SASARAN II

MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH

Pada *sasaran meningkatnya Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah* bila dibandingkan dengan target, maka tercapai realisasi dengan persentase capaian sebesar 100% pada tahun 2021 dimana realisasi memenuhi kinerja yang ditargetkan sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi sasaran II Triwulan I Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	- Persentase Peningkatan Asli Daerah	Persentase	1%	-95.10%	-95.10%
		- Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Predikat	Baik	-	0
Rata-rata Capaian						-47.55%

Beberapa hal yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran *Meningkatnya Pendapatan Daerah* pada triwulan I tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase Peningkatan Asli Daerah

Adanya kegiatan penyuluhan, pengawasan dan pemngendalian pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan Pihak Kejaksaan, dimaksudkan agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Tahun 2022.

Pengukuran Persentase Pendapatan Asli Daerah

No	INDIKATOR	REALISASI PAD TAHUN	
		2021 (Rp.)	Triwulan I 2022 (Rp.)
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah	155.470.054.144	7.623.957.572.7
Rumus		PAD Tahun n- PAD Tahun lalu/ PAD Tahun lalu	
Nilai Persentase PAD		$\frac{7.623.957.572.7 - 155.470.054.144 \times 100\%}{155.470.054.144}$	
		(0.95)	

Target untuk indeks ini adalah sebesar 1% dan realisasi sebesar -95.10% Capaian menunjukan angka -95.10%.

Pada triwulan i indikator Persentase Pendapatan Daerah belum memenuhi target. Masih memerlukan beberapa upaya untuk mengejar nilai target yang akan dicapai. Untuk indikator tersebut, pencapaian ditargetkan pada akhir triwulan IV tahun 2022. Kekurangan sebesar -93% menjadi motivasi bagi aparat khususnya pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk lebin insentif dalam melakukan penagihan pada Trwiwulan selanjutnya. Untuk penagihan PBB, pada triwulan I belum dilakukan secara maksimal, berhubung SPPT PBB belum dicetak dan didistribusikan. Pencapaian target persentase Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- Adanya beberapa potensi pajak daerah
 - Penyederhanaan proses bisnis
 - Adopsi teknologi tepat guna
 - Laik penyebaran informasi
 - Pendistribusian SPPT PBB
- b. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng selaku unit penyelenggara pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini merupakan langkah rutin untuk menjaga dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan serta untuk membangun kepercayaan terhadap penyelenggara pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan.

Harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan adalah mendapatkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Pelayanan Pajak Daerah dan retribusi Daerah berkewajiban memberikan pelayanan prima sesuai dengan janji dan standar pelayanan, serta menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan SKP yang memenuhi kenyamanan dan keinginan pengguna layanan.

Target untuk indikator ini adalah predikat BAIK dan realisasi berdasarkan Nilai IKM Tahun 2021 dengan nilai 83,78 atau predikat BAIK. Capaian menunjukan angka 100%.

Pencapaian target Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- Adanya perbaikan mutu layanan
- Adanya Penyederhanaan proses bisnis
- Kewajaran biaya/tarif penanganan pengaduan
- Tanpa gratifikasi
- Adanya aplikasi yang memudahkan layanan perpajakan

Sasaran 2 = Meningkatnya Pendapatan Daerah

⇔ Capaian Kinerja :

Meningkatnya pendapatan asli daerah

⇔ Penyebab keberhasilan/ kegagalan

1. Peningkatan layanan
2. Adanya target kinerja yang terukur dan logis.
3. Adanya aplikasi yang memudahkan layanan
4. Adanya aturan yang mengikat warga untuk membayar pajak

⇔ Kendala – kendala Yang di hadapi serta Solusi

1. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah
2. kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah
3. lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah.
4. kelemahan kualitas SDM aparatur
5. Potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Rokok.
6. Lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Solusi dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas proses pelayanan pendaftaran khususnya dalam hal Entry Data, meningkatkan level verifikasi dan penambahan tenaga petugas pendaftaran PBB.
2. Melakukan integrasi data dengan pihak-pihak terkait untuk memudahkan proses entry data.
3. Melakukan pembekalan budaya pelayanan prima kepada Loker Layanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Penyampaian himbauan kepada masyarakat untuk melaporkan bilamana ada ketidaksesuaian data pada SPPT yang terbit untuk dimutakhirkan.

b. Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

⇔ Capaian Kinerja :

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan retribusi Daerah



“Inovasi “One Man One Tax One Qris” Kab.Soppeng Raih Juara 1 OPS South Sulawesi Digifest 2022”

⇔ Penyebab keberhasilan/ kegagalan

1. Komitmen dan semangat aparatur pengelola anggaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan
2. Ketersediaan fasilitas baik peralatan maupun sistem yang terintegrasi dengan baik dalam pelayanan Pajak
3. Adanya peraturan yang mengikat tentang Pajak dan retribusi daerah
4. Penentuan target Pajak dan retribusi yang tepat

⇔ Kendala – kendala Yang di hadapi serta Solusi

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pelayanan pajak
2. Kurangnya sosialisasi tentang pembayaran pajak online

Solusi dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain :

- 1. Mengakomodir kebutuhan SDM berlatar belakang pendidikan pajak daerah
- 2. Mengembangkan layanan pajak berbasis online
- 3. Menyusun perda baru untuk merespon perubahan ketentuan penarikan jenis pajak daerah maupun retribusi daerah.
- 4. Menyusun perda baru untuk merespon dimungkinkannya penarikan jenis pajak daerah maupun retribusi daerah.
- 5. Menyusun perda baru untuk merespon perubahan ketentuan yang disusun oleh pemerintah daerah dengan dilahirkannya perda baru yang memayungi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

SASARAN III

MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR DAN KUALITAS LAYANAN PENYELENGGARAAN URUSAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG

Bila dibandingkan dengan realisasi dengan target, maka sasaran *Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng* dengan capaian sebesar 50% pada Triwulan I tahun 2022 dimana realisasi belum memenuhi kinerja yang ditargetkan sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan target dan realisasi sasaran III Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berperdikat BAIK	Persentase	100	100	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Indeks	89-82	0	0%
Rata-Rata Capaian					50.00	

Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng** pada Triwulan I tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berpredikat BAIK

Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN dalam kurun waktu penilaian. Sasaran Kinerja Pegawai disusun sebagai suatu alat ataupun sarana untuk penilaian prestasi kerja ASN yang secara sistematis dilakukan oleh pejabat penilai SKP itu sendiri dan perilaku kerja pegawai.

Table. 3.20

Pengukuran Persentase Aparatur yang mendapatkan nilai SKP “BAIK”

No	Indikator	Jumlah Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP ‘BAIK’	Jumlah ASN Tahun 201
1	Persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berpredikat BAIK	100 ASN	100 ASN
Jumlah ASN dengan Nilai SKPD ‘BAIK’ / Jumlah ASN dikali 100%			100/100 x 100%
Nilai			100%

Target untuk indikator ini adalah sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% Capaian menunjukkan angka 100%.

Pencapaian target persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berpredikat BAIK dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- Adanya reward and punishment
- Adanya pengukuran kinerja yang logis dan terukur
- Adanya tambahan penghasilam ASN

a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan

Masyarakat secara berkala minimal 1 kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng selaku unit penyelenggara penunjang urusan keuangan, dalam hal ini mengukur sejauhmana kualitas mutu pelayanan terhadap para stakeholder pengelolaan keuangan daerah.

Table. 3.21

Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng

No.	UNSUR PELAYANAN			
U1	Persyaratan			
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur			
U3	Waktu Penyelesaian			
U4	Biaya/Tarif			
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan			
U6	Kompetensi Pelaksana			
U7	Perilaku Pelaksana			
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan			
U9	Sarana dan prasarana			
Belum Dinilai				

Pencapaian target Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

- Adanya perbaikan mutu layanan
- Adanya Penyederhanaan proses bisnis
- Tanpa gratifikasi
- Adanya aplikasi yang memudahkan layanan dalam pengelolaan keuangan daerah

⇔ Capaian Kinerja :

Meningkatnya kapasitas aparatur

⇔ Penyebab keberhasilan/ kegagalan

1. Peningkatan layanan
2. Adanya target kinerja yang terukur dan logis.
3. Adanya reward and punishment

4. Adanya aplikasi yang memudahkan layanan
5. Sarana dan prasarana yang memadai

⇔ Kendala – kendala Yang di hadapi serta Solusi

1. Kurangnya pemahaman terhadap perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah
2. kelemahan kualitas SDM aparatur
3. Integrasi aplikasi belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh
4. Tingkat kedisiplinan aparatur yang masih perlu ditingkatkan
5. Adanya mutasi aparatur yang menuntut perlu adanya adaptasi dan bimbingan terkait tugas pokok dan fungsi aparatur

Solusi dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain :

1. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersdia
2. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana layanan
3. Tetap menerapkan reward and punishment yang diperoleh dari pengukuran kinerja

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi Internal Triwulan I Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2022. Secara umum tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Target Kinerja *“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah, Meningkatnya Pendapatan Daerah, dan Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng”* belum dapat dimaksimalkan pencapaiannya pada Triwulan I Tahun 2022.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91 <	Sangat Tinggi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	51 < 65	Rendah	R
5	< 50	Sangat Rendah	SR

Pencapaian ini didukung dengan kinerja Fisik (proses) sebesar 26.86% dan Pencapaian Realisasi Keuangan sebesar 8,21%. Berdasarkan kerangka pengukuran indikator dapat disimpulkan bahwa Rata-Rata tingkat pencapaian realisasi kinerja untuk ketiga sasaran tersebut adalah **33.78%** dengan kategori pencapaian *“sangat rendah”*.

Rata-Rata Capaian Sasaran Rencana Strategik Triwulan I Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	Indeks (I)	8.52	10.88	127.25%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
		Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	Indeks (I)	20	20	100%
		Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	Indeks (I)	13.92	14.72	105.67
		Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	Indeks (I)	15	0	0
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5)	Indeks (I)	3.69	0	0
		Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	Indeks (I)	15	0	0
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Asli Daerah	Persentase	1%	-95.10%	-95.10%
		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Predikat	Baik	Baik	100
3.	Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berpredikat BAIK	Persentase	100	100	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Indeks	79-81	84.44	106.89%
	Rata-rata Capaian					54,52%

Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun anggaran 2022 juga terdapat permasalahan yang mengakibatkan realisasi tidak mencapai target. Secara umum hal ini disebabkan karena :

1. Pemerintah Daerah masih mengandalkan keuangan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
2. Belum mampu menggali dan mempertahankan sumber daya daerah, dan
3. Belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan target Rencana Anggaran Kas
4. Adanya pergeseran anggaran mendahului perubahan

5. APBD 2022 akan mengalami perubahan pada tahapan Perubahan APBD Tahun 2022
6. Data Indeks keuangan Daerah untuk tahun 2022 belum dapat diukur secara manual, karena harus menyandingkan dengan rasio masing-masing kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pada Triwulan I tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Kabupaten Soppeng telah melakukan serangkaian program dan kegiatan secara terus menerus dan berkesinambungan agar hambatan/kendala selama pelaksanaannya dapat teratasi dengan baik dan lancar, solusinya antara lain adalah :

1. Tetap mengupayakan melaksanakan reward and punishment untuk lingkup eksternal dan lingkup internal Badan Pengelolaan keuangan yang secara nyata telah bermanfaat dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja.
2. Menjadwalkan kegiatan pengukuran atau pensertifikatan Barang Milik Daerah lebih awal dengan Pihak Pertanahan
3. Melakukan appraisal pada Barang Milik Daerah yang belum tercatat nilainya
4. Menjadwalkan pertemuan rutin dengan pihak KPPN terkait pengelolaan dana transfer
5. Meningkatkan pertemuan internal baik disetiap bidang maupun antar bidang untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja
6. Mengoptimalkan dan menggali Sumber Daya Daerah untuk meningkatkan pendapatan guna mendukung proses pembangunan daerah.
7. Meningkatkan tertib administrasi khususnya pencatatan kartu kendali sub kegiatan
8. Rutin dalam melakukan rekonsiliasi dengan SKPD baik terkait pengelolaan penatausahaan keuangan, laporan keuangan maupun laporan Barang Milik Daerah
9. Pengukuran Tata Kelola keuangan yang terukur dan logis melalui pengukuran setiap dimensi, dapat dijadikan pertimbangan dan data pembanding dalam pengambilan kebijakan terkait bidang keuangan pada triwulan selanjutnya.

Dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan I tahun 2022 ini harapannya kedepan akan lebih baik lagi dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian evaluasi internal ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Laporan Evaluasi Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Watansoppeng, 11 April 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG**

 **Drs. H. DIPA. M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19680102 199603 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN SALOTUNGO NO. 3 TELP (0484) 21006 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 7 Maret 2022

Kepada

Nomor : 310 / BPKPD / III / 2022

Lamp : -

Perihal : **Rapat Pengendalian
Kegiatan TA 2022.**

Yth. Para Pejabat Eselon III, Bersama Pejabat
Eselon IV, dan Staf Lingkup BPKPD
Kabupaten Soppeng

di

Tempat

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022, dan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan di lingkungan BPKPD, maka diharapkan untuk mengikuti Pertemuan dengan Jadwal sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL	KETERANGAN
1.	Pejabat Eselon III	Tanggal 1 setiap bulan	Jika bertepatan dengan Tanggal MERAH/LIBUR, maka akan dipindahkan ke Tanggal berikutnya.
2.	Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf	Tanggal 2 setiap bulan	Jika bertepatan dengan Tanggal MERAH/LIBUR, maka akan dipindahkan ke Tanggal berikutnya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BPKPD
KABUPATEN SOPPENG

DRS. H. DIPA, MSi

Nip. 19680102 199603 1 005

NOTULEN RAPAT

Agenda : Pertemuan dalam rangka evaluasi Internal Triwulan I
Tahun 2022

Hari/Tanggal : Selasa/8 Maret 2022

Waktu Rapat : 08.30 Wita s.d selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Lantai III

Peserta Rapat : Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kab. Soppeng.

Kegiatan Rapat :

I. Kata Pembukaan :

Acara dibuka oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng pada pukul 09.00 Wita

II. Pembahasan :

- Diharapkan agar para Aparatur Sipil Negara pada BPKPD memperhatikan disiplin jam kerja, hal ini guna menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Makassar, bahwa absensi selama kurun 2 tahun masih secara manual.

Walaupun secara manual diharapkan agar para ASN senantiasa disiplin dalam jam kerja sesuai aturan yang berlaku

- Beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya, dan tetap dianggarkan pada tahun ini, sekiranya dapat lebih dioptimalkan pencapaiannya, sehingga kekurangan atau pun kegagalan tahun sebelumnya dapat diminimalisir.
- Diharapkan agar setiap Aparatur Sipil Negara khususnya bagi pejabat Eselon III dan IV lebih memahami tugas pokok dan fungsinya, agar dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Penutup :

Rapat ditutup oleh pada pukul 11.00 Wita oleh Drs. H. DIPA.,M.Si

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipedomani dan bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

NOTULEN,

ANDI NUR UMaya
NIP. 19811006 2009 01 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
JL. SALOTUNGO NO. 3 TLP. (0484) 21066 WATANSOPPENG

DAFTAR HADIR
BPKPD KABUPATEN SOPPENG

HARI : SELASA
TANGGAL : 08-03-2022
WAKTU :
TEMPAT : R. RAPAT M-TGR LT. III

TGL. 28 MAREK 2022
PAPAF: B

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	DRS. H. DIPA, M.Si	Kep. BPKPD	L	
2	LIES UTINI	sekretaris	P	
3	NUR SIDA	Kasubid AKUNTANSI	P	
4	AIN	Ases	L	
5	IRFAN	Anggota	L	
6	HAMPIAH	Perbendaharaan	P	
7	ROSCENI A. CAMARA	Kasubid Anggaran	P	
8	IRWAN, SE	Kasubid Urtgi	L	
9	MUKARRAB	K.TU Citta	L	
10	AGUS	Ku. updt Cilikung	L	
11	Nurdahat. Nur	Kasubag. Umum	P	
12	FALSA HC	Kasubid Peng Kas	L	
13	A. Sriwedari	Kasubid Perbendah.	P	
14	HELIPRA	staf	P	
15	A. Asprah	staf	P	
16	SITTI SUKMAH	staf	P	
17	MAHENDRAWATI	staf	L	
18	G. Arinas	staf	P	
19	SOFYANE	Ka. Sub Perengihan	L	
20	MULIANI	Ka. updt Marioriwano	P	
21	TAHLIRAH	perbendaharaan	P	
22	ELURA	perbendaharaan	P	
23	ANY LHMRIANY	-	P	
24	SENNI	-	P	

90	YUSUF	STAF	L		
89	ASHAR	STAF	L		
88	ABICALIM	STAF	L		
87	MUSIH RAHMANI	STAF	L		
86	Hendro	STAF	L		
85	HERMANI	STAF	L		
84	MUSRIADI		L		
83	RAUH-NURZA ALFAN		L		
82	Musdiansah Sunu	STAF	L		
81	Idma		L		
80	Sumardi SIP		L		
79	Mohammad Hani		L		
78	ZULMAHDI		L		
77	agus Salim		L		
76	ABUSMAN		L		
75	Prayogi		L		
74	MURHAZIM		L		
73	Ida		L		
72	A. ZALHUDDIN		L		
71	Eapriadi		L		
70	Zulkifli		L		
69	MUH YUSUF Sp		L		
68	Kuncoro		L		
67	AKRAM		L		
66	Syih Faisal		L		
65	Idri		L		
64	Puji		L		
63	ANDI NUR		P		
62	SANDHY HARVIADY		L		
61	FIRMAZANI-M		P		
60	ANDI SAMIT		L		
59	EMAN/ SUPRAN				
58	JUMARSAN M				

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
 BADAN PENGELOLAAN
 LEMBAR DISKUSI
 02/10/2020/10/2020

25	NIKA ARIAN	Staf Alumnus	P		
26	ACKA		P		
27	MARHANA		P		
28	KANDAWATI	Staf PDB	P		
29	SAKRANI		P		
30	A.M. KHUWA NURDIN		L		
31	Mastang	Staf PAD	P		
32	A. NASEA M	-II-	P		
33	Hernati	-II-	P		
34	Rudi Huzianu	Staf PAD	P		
35	Hatibi	Staf PSD	L		
36	A. IRMA	Staf	P		
37	Sultra Mappo	Staf	P		
38	MARIANA	Staf	P		
39	Anna I. Anis		P		
40	Yusuf		L		
41	A. WAHYUDDIN	KTU SAMBA	L		
42	Us. ANITA MARIANA	Keselid	P		
43	Titral	Andis	L		
44	Syajaeni Syam	Staf	P		
45	TASPE	KTU Maria Rumus	L		
46	A. Asup Northinah	Anggaran	P		
47	Najwa Sakabillah. In	Anggaran	P		
48	A. Fathul Hazi	Anggaran	L		
49	Hernati	Anggaran	P		
50	JENNY IRANIAN	SEKRETERAT	L		
51	Dwi Panna Agunt	Staf	P		
52	HERYARA	Staf	P		
53	INTIADI	UPTD CITTA	L		
54	Patmirah	Staf	P		
55	Mah Fides	UPTD	L		
56	A. SURHANI	KTU UPTD KEL. M. RIWAH	P		
57	FACHINDA	STAF	P		
58	AYU LESTARI	STAF	P		
59	MUH. NURIZ ALFIZAR	STAF	L		

TELAH DITOLAK
 TGL: 29 MAR 2022
 PARAF:

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 M.B.A.R. DISPOSISI
 11-04-2022
 1059/1440/IV/2022

93	UCI EKA PUTRA		L		
94	Ardi Asriguna		L		
95	Riski Dwi Julionita		P		
96	ardi Sanjaya		L		
97	Dian Awal S.		L	Dnd.	
98	Ahaswal Syairan.		L		
99					
100					

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPRENG


Drs. H. DIPA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680102 199603 1 005



OPPO F7 · ©By Nur
2022/03/08 09:09 Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan



OPPO F7 · ©By Nur
2022/03/08 08:44 Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan



OPPO F7 · ©By Nur
2022/03/08 09:09 Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jln.Salotungo No. 3 Telp. (0484) 21066 Watansoppeng 90812

BERITA ACARA
EVALUASI INTERNAL REALISASI KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2022
Per 8 Maret 2022

Pada hari ini Selasa, 8 Maret 2022 bertempat di Ruang Rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. DIPA.,M.Si
NIP : 19680102 199603 1 005
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
Kabupaten Soppeng

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 26/BPKPD/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, tersebut dibawah ini

Nama : LIES UTINI., S.E.,M.Si
NIP : 19690825 199312 2 002
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Soppeng

Berdasarkan Hasil Rapat tentang Evaluasi Internal selama Triwulan I pertanggal 8 Maret 2022 maka Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan hasil sebagai berikut:

Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada Tahun Anggaran 2021 melaksanakan 4 (empat) Program, Kegiatan sebanyak 13 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan.

Adapun realisasi setiap Sub Kegiatan terlampir pada Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

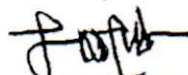
Watansoppeng, 8 Maret 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG


Drs. H. DIPA, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. : 19680102 199603 1 005

SEKRETARIS,



LIES UTINI, SE., M.Si

Pangkat : Pembina
NIP : 19690825 199312 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN SALOTUNGO NO. 3 TELP (0484) 21006 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 7 Maret 2022

Kepada

Nomor : 310 / BPKPD / III / 2022

Lamp : -

Perihal : **Rapat Pengendalian
Kegiatan TA 2022.**

Yth. Para Pejabat Eselon III, Bersama Pejabat
Eselon IV, dan Staf Lingkup BPKPD
Kabupaten Soppeng

di

Tempat

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022, dan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan di lingkungan BPKPD, maka diharapkan untuk mengikuti Pertemuan dengan Jadwal sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL	KETERANGAN
1.	Pejabat Eselon III	Tanggal 1 setiap bulan	Jika bertepatan dengan Tanggal MERAH/LIBUR, maka akan dipindahkan ke Tanggal berikutnya.
2.	Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf	Tanggal 2 setiap bulan	Jika bertepatan dengan Tanggal MERAH/LIBUR, maka akan dipindahkan ke Tanggal berikutnya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BPKPD
KABUPATEN SOPPENG

DRS. H. DIPU, MSi

Nip. 19680102 199603 1 005

NOTULEN RAPAT

Agenda : Pertemuan dalam rangka evaluasi Internal Triwulan I
Tahun 2022

Hari/Tanggal : Senin/4 April 2022

Waktu Rapat : 09.30 Wita s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Lantai II

Peserta Rapat : Pejabat Eselon III dan IV BPKPD Kab. Soppeng.

Kegiatan Rapat :

III. Kata Pembukaan :

Acara dibuka oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng pada pukul 09.30 Wita

IV. Pembahasan :

- Beberapa progress kegiatan banyak yang belum dilaksanakan baik fisik maupun keuangan, walaupun telah direncanakan sebelumnya pada awal tahun. (LIES UTINI.,S.E.,M.Si)
- Menindaklanjuti untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk Refosmasi Birokrasi, utamanya beberapa hal dalam Lembar Kerja evaluasi yang belum didukung dengan bukti fisik (LIES UTINI.,S.E.,M.Si)
- Diharapkan agar terkait data realisasi anggaran (baik covid, PEN, dll) dapat ditangani oleh bidang yang menangani realisasi data (H. IRFAN.,S.E.,M.M)
- Terdapat sekitar 49 bidang tanah yang sudah diukur dan terbit sebanyak 28 sertipikat. 10 diantaranya ada sertipikat pengganti
3 adalah sertipikat yang terbit dari kegiatan PTSL dan sisanya adalah penerbitan sertipikat reguler

Tanah dibawah jalan sudah didaftar akan tetapi masih menunggu jadwal dari pertanahan untuk pengukuran. khusus tanah dibawah jalan terkendala beberapa permohonan dalam satu ruas jalan karena terdapat beberapa desa/ kelurahan dan atau batas alam yang dilewati ruas tersebut sehingga akan terbit beberapa sertipikat dalam satu ruas tanah dibawah jalan

Terkait tanah yang belum memiliki nilai perolehan dan hanya biaya sertipikat, menurut BPK bahwa tanah tersebut akan dilakukan appraisal (FITRAH.,S.E)

- Penutup :

Rapat ditutup oleh pada pukul 11.00 Wita oleh LIES UTINI.,S.E.,M.M

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipedomani dan bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

NOTULEN,

ANDI NUR UMayA
NIP. 19811006 2009 01 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
JL. SALOTUNGO NO. 3 TLP. (0484) 21066 WATANSOPPENG

DAFTAR HADIR
BPKPD KABUPATEN SOPPENG

HARI : Senin
TANGGAL : 4 April 2022
WAKTU : 09.30 s.d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Pimpinan

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1				1
2				2
3				3
4	NUR AIDA	KABID AKUNTANSI	P	4
5	H. Irwan	Kabid Anggaran	L	5
6	Pitrah	Analisis Keuangan	L	6
7	ROSEALI A. CHAACH	Kabid Anggaran	P	7
8	Nur Umayen	Perencanaan	P	8
9	Asri	Analisis	P	9
10	Nurdialis, Nur	Kabid. Umum	P	10
11	HA ANITA MARIANA	Kasubid analisis keuangan	P	11
12	Sriwana	Kasubid Penghapusan s.d.m.g.h	P	12
13	Rohman afi	Kasubid. Ak.	P	13
14				14
15	COFYANG	Analisis Keuangan	L	15
16	Andi Sriwedani	Kasubid Perbendah	P	16
17	INDARYANI	Kasubid BM	P	17
18	Muti. Rudean		L	18
19			L	19
20	FAISAL HC		L	20
21	Hamriani	Kabid. perbendah	P	21
22				22
23				23





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jln.Salatungo No. 3 Telp. (0484) 21066 Watansoppeng 90812

BERITA ACARA
EVALUASI INTERNAL REALISASI KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2022

Per 4 April 2022

Pada hari ini Senin, 4 April 2022 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LIES UTINI., S.E.,M.Si

NIP : 19690825 199312 2 002

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Soppeng

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 26/BPKPD/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, tersebut dibawah ini

Nama : ANDI NUR UMayA., S.E

NIP : 19811006 200901 2 008

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

Berdasarkan Hasil Rapat tentang Evaluasi Internal selama Triwulan I pertanggal 4 April 2022 maka Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan hasil sebagai berikut:

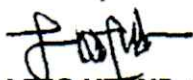
Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada Tahun Anggaran 2021 melaksanakan 4 (empat) Program, Kegiatan sebanyak 13 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan. Jumlah anggaran Belanja Langsung sebanyak Rp. 145.203.297.649,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.3.042.457.641,- atau sebesar 2.10%

Adapun realisasi setiap Sub Kegiatan terlampir pada Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 4 April 2022

SEKRETARIS,
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG



LIES UTINI, SE., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19690825 199312 2 002

KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN



ANDI NUR UMAHA, S.E

Pangkat : Penata

NIP. 19811006 200901 2 008